BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek/Subyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY Terdiri dari 1 Kota yaitu: Yogyakarta dan 4 Kabupaten yaitu: Gunungkidul, Bantul, Sleman, Kulonprogo. Dan sobyek penelitiannya adalah Laporan Realisasi APBD tahun 2006-2010 dan Neraca tahun 2006-2010 yang telah diperiksa/diaudit oleh BPK dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)-nya telah dipublikasikan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter yaitu berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan rekaman historis mengenai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY pada tahun 2006 – 2010. Data penelitian berupa: Data Neraca Daerah, realisasi PAD, target PAD, Total Pendapatan Daerah, DAK, DAU, Belanja Langsung, Belanja tidak Langsung dan Pembayaran Utang Pokok dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY tahun 2006–2010 yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi DIY dan diperoleh dari BPS

C. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada Di Provinsi DIY, yaitu Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada Di Provinsi DIY adalah sebanyak 5 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 (satu) pemerintah kota, dan 4 pemerintah kabupaten. Teknik pengambilan sampel (*sampling*) dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dengan pertimbangan (*judgment purposive sampling*), yaitu tipe pemilihan sampel tidak secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dan umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian Supomo dan Indrianto, 2002 dalam Hendraryadi, 2011. Syarat yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah kabupaten/kota Di Provinsi DIY yang telah menyusun laporan keuangan tahun antara tahun 2006 - 2010
b. Laporan keuangan pemerintah daerah tahun antara tahun 2006 - 2010 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan semester pertama tahun 2010
c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2006 - 2010 telah dipublikasikan melalui *website* resmi BPK.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penilitian ini dilakukan adalah dengan penelusuran data sekunder dengan kepustakaan dan manual. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan proses pelaksanaan dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari

dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang praktik pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Data-data ini diperoleh dari di www.bpk.go.id yang merupakan *website*/situs resmi BPK dan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi DIY dan Data berupa Laporan Realisasi APBD yang diperoleh secara langsung dari masing-masing Kabupaten/Kota.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY. Dengan pertimbangan selama ini masih jarang peneliti melakukan penelitian secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY antara tahun 2006-2010. Kedua variabel bersifat korelasi. Masing-masing variabel dianalisis dengan menggunakan empat indikator kinerja yaitu kemandirian keuangan daerah, efektifitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah dan aktivitas keuangan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah

Adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai kelaluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan

masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Syamsi, (1986:199) dalam Susantih dan Saftiana (2010:05).

a. Analisis Kemandirian

Analisis kemandirian daerah menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah Mahmudi, (2007: 128). Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Rumusan rasio kemandirian daerah yaitu:

$$\textit{Kemandirian } i = \frac{\textit{PAD } i}{\textit{Total Pendapatan Daerah } i}$$

Keterangan i = Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana *ekstern*. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak *ekstern* (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Selanjutnya kriteria kemampuan daerah dapat dikategorikan sangat baik jika nilai rasio kemandiriannya diatas 50 persen, baik jika nilai rasio kemandiriannya lebih dari 40 persen sampai dengan 50 persen, cukup jika nilai rasio lebih dari 30 persen sampai dengan 40 persen, sedang jika nilai rasio lebih dari 20 persen sampai dengan 30 persen, kurang jika nilai rasio lebih dari 10 sampai dengan 20

b. Analisis Efektifitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumusan rasio efektifitas yaitu:

$$\textit{Efektifitas } i = \frac{\textit{Realisasi PAD } i}{\textit{Target Penerimaan PAD } i}$$

Keterangan i = Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY.

Berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 kriteria nilai efektifitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika nilai rasionya di atas 100 persen, efektif jika nilai rasionya 90-100 persen, cukup efektif jika nilai rasionya 80-90 persen, kurang efektif jika nilai rasionya 60-80 persen dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang dari 60 persen.

c. Analisis Efisiensi Keuangan

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

d. Analisis Aktivitas Keuangan

Analisis aktivitas keuangan daerah adalah bagaimana Pemda memperoleh dan membelanjakan pendapatan daerahnya. Analisis aktivitas diklasifikasikan menjadi 4 analisa rasio yaitu analisa rasio keserasian, *Debt Service Coverage Ratio (DSCR),* Rasio Utang Terhadap PAD dan Rasio Utang terhadap Total Pendapatan Daerah.

1. Rasio Keserasian

Keserasian belanja dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi anggaran pada Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik atau Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung secara optimal. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Keserasian belanja daerah digunakan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja daerah.

a). Rasio Belanja Aparatur dan Belanja Publik

Rasio analisis ini digunakan untuk mengetahui prosentase dari proporsi belanja daerah yang dialokasikan pada belanja aparatur dan belanja publik. Semakin tinggi prosentase anggaran yang dialokasikan untuk belanja aparatur berarti prosentase belanja publik yang digunakan untuk menyediakan sarana

sebaliknya. Rasio belanja aparatur terhadap total belanja daerah digunakan menganalisa belanja daerah pada tahun 2006. Secara sederhana rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\textit{Rasio Belanja Aparatur Daerah terhadap APBD } i = \frac{\textit{Belanja Aparatur Daerah}}{\textit{Total Belanja Daerah}}$$

$$\textit{Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap APBD } i = \frac{\textit{Belanja Pelayanan Publik}}{\textit{Total Belanja Daerah}}$$

b). Rasio Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung

Pengendalian biaya dan pengendalian anggaran dibutuhkan oleh manajemen internal pemerintah yang dapat diperoleh dengan menggunakan analisa proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengelompokan belanja daerah kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah, adalah pengelompokan belanja daerah berdasarkan atas aktivitas bukan pengelompokan berdasarkan atas manfaat yang diperoleh. Dalam System Pengendalian Sektor Publik, katagori dari belanja langsung sebagai biaya yang dibutuhkan guna terlaksananya kegiatan/program dari unit kerja. Sedang katagori belanja tidak langsung merupakan belanja daerah yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas dari program dan kegiatan. Pengendalian belanja langsung dapat dilaksanakan dengan menggunakan Analisa Standar Belanja (ASB) dan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Sedang

anggaran ketat dan efisiensi anggaran. Rumus sederhana yang digunakan untuk mengetahui prosentase dari proporsi belanja daerah yang dialokasikan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung Terhadap APBD} = \frac{\text{Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak langsung Terhadap APBD} = \frac{\text{Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Karena belum ada tolok ukur yang jelas mengenai rasio keserasiaan pemerintah daerah saat ini maka untuk membandingkan rasio keserasian pemerintah kabupaten/kotadi Jawa Tengah, pada penelitian ini dilakukan penghitungan rata-rata belanja pegawai dan belanja pelayanan publik selama tahun penelitian.

2. ***Debt Service Coverage Ratio*** **(DSCR)**

Analisis DSCR untuk melihat kemampuan pemda dalam menggunakan alternative sumber dana lain melalui pinjaman, nilai DSCR minimal 2,5. Rumusan untuk menghitung DSCR adalah sebagai berikut:

$$DSCR\ i = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total\ (Pokok\ Angsuran + Bunga + Biaya\ Pinjaman)}$$

Keterangan:

DSCR *i* = *Debt Service Coverage Ratio* Pemerintah Daerah se DIY

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD =Bagian Daerah merupakan hak daerah atas penerimaan yang

Pajak KendaraanBermotor, Penerimaan Sumber Daya Alam serta Bagian Daerah Lainnyaseperti PPh Perseorangan.

DAU = Dana Alokasi Umum

BW =Belanja Wajib merupakan jenis belanja daerah yang harus dipenuhi/tidakbisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti BelanjaPegawai dalam Belanja Tidak Langsung serta Pembayaran Utang Pokok.

3. Analisis Rasio Utang Terhadap PAD

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan Pendapatan Asli Daerah. Semakin rendah nilai rasio ini maka akan semakin baik, rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang terhadap PAD} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

4. Analisis Rasio Utang terhadap total pendapatan Daerah

Rasio ini merupakan perbandingan antara total utang dengan total pendapatan daerah, semakin rendah rasio ini maka akan semakin baik. Rasio ini dinyatakan baik jika nilai rasio ini berkisar antara 20%-40%. Apabila diatas 40% maka dikategorikan sangat jelek, antara 10%-20% dikategorikan cukup baik, jika dibawah 10% berarti sangat baik. Rasio ini dirumuskan sebai berikut:

$$\text{Rasio Utang Terhadap Pendapatan Darah} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

F. Metode Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat pendugaan (*inference*) atas suatu teks Utomo, 1992 dalam Hendraryadi (2011). Teks yang ada dikondifikasikan ke dalam beberapa kelompok atau kategori berdasarkan kriteria tertentu (Utomo, 1998 dalam Hendraryadi 2011). Prosedur analisis data dilakukan dengan tahap-tahap sebagi berikut:

1. Pemetaan Indikator Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada bagian pertama, dengan menggunakan instrumen penelitian (hasil analisa laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan empat indikator kinerja keuangan yaitu kemandirian daerah, efektifitas, efisiensi dan aktivitas), peneliti menelusuri laporan keuangan pemerintah daerah yang dijadikan sampel untuk mencari besaran nilai perbandingan kinerja dan perubahan kinerja antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dari hasil penelusuran tersebut akan dipetakan laporan keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY antara tahun 2006- 2010.

Instrumen penelitian terdiri atas empat indikator kinerja yaitu kemandirian keuangan daerah, efektifitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah dan aktivitas keuangan daerah.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk menganalisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$Kemandirian\ i = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah\ i}$$

Keterangan i = Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY.

b. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah dapat dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektifitas\ i = \frac{Realisasi\ PAD\ i}{Target\ Penerimaan\ PAD\ i}$$

Keterangan i = Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang digunakan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

d. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah

Rasio Aktivitas Keuangan Daerah terdiri dari 4 rasio yaitu:

1). Rasio Keserasian

a). Rasio Belanja Aparatur dan Belanja Publik

Untuk menganalisis Rasio Rasio Belanja Aparatur dan Belanja Publik digunakan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Belanja\ Aparatur\ Daerah\ terhadap\ APBD\ i = \frac{Belanja\ Aparatur\ Daerah}{Total\ Belanja\ Daerah}$$

2. Uji Statistik Diskriptif

Uji statistik Diskriptif dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan deskripsi mengenai data yang diperoleh. Dari analisis statistik ini akan diperoleh mean, nilai terendah, dan nilai tertinggi, serta standar deviasi dari data yang diolah dan varian dengan prosedur sebagai berikut:

a. Menentukan tingkat rata-rata (*mean*), nilai terendah dan nilai tertinggi, standar deviasi dan varian indikator rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010.
b. Menentukan perbedaan mean (naik/turun) indikator rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010.

3. Uji Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan uji *metode Kolmogorov-simirnov* pemilihan metode ini didasarkan bahwa *Kolmogorov-simirnov* merupakan metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data dengan jumlah data kurang dari 30 sampel . Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan adalah berdistribusi normal atau tidak. Sampel berdistribusi normal apabila *sig* > taraf signifikansi yang digunakan dalam pengujian, dalam hal ini adalah 95% atau α 5%. Sebaliknya dikatakan tidak normal apabila *sig* < taraf signifikansi. Pengujian ini menggunakan program SPSS versi

15. Jika hasil uji menunjukkan sampel berdistribusi normal

4. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians yang diuji dalam penelitian ini sama atau berbeda. Dapat dikatakan homogen atau variansnya sama apabila nilai sig>0.05, maka dapat dilakukan uji selanjudnya yaitu uji anova. Uji anova dapat dilakukan apabila variansnya sama atau homogen.

5. Uji Hipotesis.

Akan dilakukan pengujian mengenai perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam laporan keuangan pada kelima tahun yang diteliti. Pengukuran ini dimaksudkan untuk menguji adanya perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah antar Kabupaten/Kota antara tahun 2006-2010. Untuk uji hipotesis menggunakan *uji Anova* dan *uji Manova*

a. Anova (untuk Menguji Hipotesis 1-8)

Anova merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah 2 populasi atau lebih yang independen, memiliki rata-rata yang berbeda atau sama. Uji ini untuk menguji hipotesis H1 sampai H8, dengan menggunakan tingkat signifikansi 0.05, maka jika nilai sig < 0.05 maka terdapat perbedaan yang signifikan masing-masing indikator kinerja keuangan antar Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY antara tahun 2006-2010. Cara perhitungannya adalah:

1). Merekapitulasi nilai rata-rata untuk masing-masing indikator tiap-tiap Kabupaten dan Kota untuk setiap tahunnya yaitu tahun 2006-2010

2). Membandingkan tiap-tiap indikator antar Kabupaten dan Kota untuk setiap tahunnya apakah terdapat perbedaan yang signifikan dengan menggunakan

b. Manova (untuk Menguji Hipotesis 9)

Sedangkan uji Manova Untuk mengetahui signifikansi perubahan indikator kinerja pemerintah daerah secara simultan dari semua indikator (kemandirian, efektifitas, efisiensi dan aktivitas) antara tahun 2006-2010. Dengan menggunakan tingkat sig 0.05 jika nilai sig < 0.05, maka terdapat perbedaan yang secara statistik signifikan masing-masing indikator kinerja keuangan antar Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY antara tahun 2006-2010. Cara perhitunganya adalah:

1). Menghitung nilai rata-rata untuk masing-masing indikator pada tiap-tiap Kabupaten dan Kota untuk tahun 2006-2010.

2). Menjumlahkan nilai rata-rata dari indikator pada tiap-tiap Kabupaten dan Kota

3). Dari hasil penjumlahan tersebut kemudian di bandingkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dengan menggunakan alat analisis *Manova.*